

Pengungsi Vietnam di Indonesia 1975-1979

Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979**Moh. Fandik****NIM.084284049 Pend. Sejarah Universitas Negeri Surabaya****Email : Kudungga_kutai@yahoo.com****ABSTRAK**

Selama tiga puluh tahun perang melanda negara Vietnam dan berakhir pada tahun 1975. Perang Vietnam yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan berbagai segi kehidupan dan lingkungan alam. Perang yang telah usai bukan berarti permasalahan telah selesai. Banyak penduduk Vietnam melakukan pengungsian meninggalkan negara mereka untuk mencari negara baru demi kehidupan yang lebih baik. Meskipun perang Vietnam telah usai secara resmi, namun permasalahan besar belumlah selesai. Pada tahun 1979 terjadi pengungsian yang dilakukan oleh penduduk Vietnam secara besar-besaran. Berbagai negara yang menjadi tempat tujuan para pengungsi salah satunya negara Indonesia. Faktor utama penyebab terjadinya arus pengungsi ialah kondisi yang tidak stabil negara Vietnam pasca perang saudara pada tahun 1975. Sekitar 25.000 pengungsi telah berdatangan di Indonesia pada tahun 1979 agar tidak menimbulkan ketidastabilan sosial dalam negeri akibat banyaknya arus pengungsi, Pemerintah Indonesia menyediakan tempat khusus bagi mereka yaitu Pulau Galang. Alasan pemerintah milih Pulau Galang sebagai tempat penampungan sekaligus pemrosesan arus pengungsi yakni letaknya strategis sehingga memudahkan Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam menangani pengungsi Vietnam. Kedatangan pengungsi Vietnam membawa dampak tersendiri bagi penduduk lokal di Pulau Galang yaitu berupa dampak sosial maupun ekonomi.

Kata kunci : Pengungsi, Vietnam, Indonesia, Pulau Galang**Moh. Fandik****NIM.084284049 Pend. Sejarah Universitas Negeri Surabaya****Email : Kudungga_kutai@yahoo.com****Abstract**

During the thirty years of war swept the country of Vietnam and ended in 1975. Prolonged Vietnam War caused damage to various aspects of life and the natural environment. War is over does not mean the problem has been completed. Many residents of Vietnamese refugees leaving the country perform their new country mencari for a better life. Although the Vietnam War has officially ended, but the big problem is not yet complete. Displacement occurred in 1979 by the Vietnamese population on a large scale. Various state a destination one displaced Indonesia. The main factor causing the flow of refugees is an unstable state after the Vietnam civil war in 1975. Some 25,000 refugees have arrived in Indonesia in 1979 so as not to cause social instability in the country due to the large influx of refugees, the Government of Indonesia provides a special place for them, namely Pulau Galang. The reason government election Galang Island sabagai shelter once the processing of refugee flows strategic location making it easier for the Government of Indonesia to coordinate with neighboring countries such as Malaysia and Singapore in dealing with Vietnamese refugees. Arrival Vietnam penungsi bring disparate impact for the local population in Galang Island in the form of social and economic impacts.

Keywords: refugee, Vietnam, Indonesia, Galang Island

PENDAHULUAN

Tantangan yang berat bagi republik demokratik Vietnam adalah berkaitan dengan masalah material dan inmaterial. Dua masalah utama ini yaitu mengubah¹. sistem ekonomi perang menjadi sistem ekonomi damai, yang menuntut suatu peraturan transisi sosial politik di daerah Selatan yang baru direbut dan menjalin hubungan luar negeri yang baik sehingga berdampak ada pengakuan². dari negara lain mengenai legitimasi dan keberadaan negara Vietnam yang telah merdeka. Kedua masalah pokok inilah yang kemudian diterjemahkan dalam politik luar negeri maupun politik dalam negeri.³

Setelah pemerintah Hanoi pada tahun 1976 berhasil mengintegrasikan secara politik kedua Vietnam. Pada bulan Maret 1978 pemerintah Hanoi mulai melaksanakan usaha pengintegrasian sistem sosial dan ekonomi secara bertahap pemerintah mengadakan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. Pada tanggal 3 maret 1978 pemerintah mulai menasionalisasikan perusahaan-perusahaan swasta dan kemudian mengeluarkan suatu kebijakan yang isinya membatasi kekayaan orang-orang Vietnam. Kekayaan yang dimiliki oleh tiap orang dibatasi oleh pemerintah Vietnam hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal saja dan selebihnya akan disita untuk kas Negara. Tanggal 3 Mei 1978 pemerintah mulai menyatukan mata uang diseluruh Vietnam.

Kebijakan baru pemerintah Vietnam yang akan dilaksanakan disamping ditujukan untuk mencapai masyarakat sosialis Komunis, juga dimaksudkan untuk menanggulangi masalah perekonomian di dalam negeri yang sangat kritis akibat keadaan perang selama lebih dari 30 tahun. Beban berat ini ditambah lagi dengan ikut campurnya Vietnam di Laos dan Kamboja. Untuk mencukupi tersedianya cadangan pangan bagi rakyatnya pemerintah menjalankan program pemindahan penduduk ke desa-desa yang tujuannya untuk mengolah pertanian di daerah yang disebut "New Economic Zone" (NEZ).

Pelaksanaan NEZ pemerintah Vietnam membangun tempat reduksi dan sistem kepenjaraan bagi eks orang Vietnam Selatan dan keturunan Cina. Penampungan reedukasi dilakukan kerja paksa, dengan jaminan makanan yang tidak seimbang. Jatah makan mereka 400-470 gram/hari, diberi daging saat hari raya nasional, dan kesehatan mereka kurang diperhatikan. Dampaknya timbul kalaparan dan penghuninya banyak yang sakit. Ditempat itu juga penghuninya dijadikan tenaga kerja tamu ke Siberia, sebagai alat pengganti bayar hutang Vietnam ke Rusia.

Hasil dan Pembahasan : Pengungsi Vietnam

Parahnya perekonomian di dalam negeri Vietnam mempercepat pelaksanaan kebijaksanaan baru pemerintah. Hal tersebut sangat membuat kepanikan sekitar 800.000 orang keturunan Cina yang tinggal di kota Cholon, di kota tersebut terdapat 30.000 perusahaan swasta serta sebagian besar pegawai perusahaan tersebut ialah orang Cina. Mereka tidak terbiasa bekerja kasar di

bidang pertanian, oleh karena itu mereka berfikir lebih baik lari dari negara Vietnam. Adapun faktor lain penyebab keinginan penduduk Vietnam yang keturunan Cina untuk meninggalkan negaranya yaitu:

1. Ketakutan orang Vietnam bahwa orang-orang keturunan Cina akan digunakan oleh RRC sebagai alat untuk menguasai Vietnam. Prasangka ini tak lepas dari ketidakharmonisan politik luar negeri Vietnam –RRC.
2. Adanya diskriminasi rasial, anak-anak keturunan orang Cina tidak diijinkan untuk memasuki sekolah dan orang-orang Cina tidak diperkenankan untuk bekerja di pemerintahan.
3. Adanya ketegangan yang semakin meningkat antara RRC-Vietnam disebabkan semakin meningkatnya intervensi militer Vietnam di Kamboja sehingga memancing Invasi RRC ke wilayah Vietnam.

Tiga alasan ini memperjelas jika pengungsi-pengungsi yang datang ke negara-negara ASEAN khususnya Indonesia 70% adalah keturunan Cina.

Usaha menanggapi masalah pengungsi tersebut, pemerintah Hanoi selalu menyatakan bahwa orang-orang yang ke luar dari Vietnam tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem sosialis. Mereka dianggap sebagai kaum reaksioner, borjuis dan tidak memenuhi syarat bagi program pemerintah yang hendak dicapai. Dalam menghadapi persoalan ini sedikitnya pemerintah Hanoi berbeda dengan rezim Pol Pot yang menjalankan terror secara besar-besaran terhadap orang yang tidak disenangi dan membangkang terhadap kebikannya. Pemerintah Vietnam mengambil jalan dengan menekan mereka supaya meninggalkan Vietnam.

Ada dua keuntungan bagi pemerintah Vietnam dengan adanya pengusiran orang-orang keturunan Cina tersebut yaitu *Pertama* dengan tidak membunuh mereka atau memasukkan mereka ke kamp-kamp kerja paksa, pemerintah Vietnam akan dianggap berperikemanusiaan. Di samping itu mendirikan kamp-kamp kerja paksa memerlukan biaya yang tidak sedikit. *Kedua*, pemerintah Vietnam sudah tidak mempunyai beban dengan adanya orang-orang yang dianggapnya *reaksioner* dan *borjuis* sehingga maksud untuk membangun masyarakat sosialis akan tercapai, karena orang keturunan Cina yang dianggap oleh pemerintahan Vietnam dapat digunakan oleh RRC sudah dapat disingkirkan.

Masalah ekonomi menjadi lebih parah pada saat itu ketika adanya musim hujan yang berkepanjangan sehingga menghancurkan sekitar 923.000 ha sawah, dan mengakibatkan banjir besar yang menyebabkan 4,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Akibat hujan tersebut padi yang siap panen hancur yang artinya hampir tiga juta ton beras juga ikut hancur, irigrasi-irigrasi yang baru dibuat juga ikut hancur. Bencana lain yang menimpa adalah kehancuran sekitar 365.000 ha tanah pertanian di Vietnam oleh hama karena sangat kurangnya persediaan obat anti hama (pertisida) dan kurang effisiennya peralatan penyemprotan hama.

Konflik Kamboja-Vietnam yang terus meningkat sejak bulan Desember 1977, membuat RRC berinisiatif menghentikan bantuan kepada negara Vietnam. Pada saat itu pasukan Vietnam memulai

intervensinya ke Kamboja dengan ditunjang oleh peralatan militer berat dan pesawat-pesawat tempur dengan dalih membebaskan wilayah-wilayah Vietnam yang direbut oleh Kamboja sebelumnya. Intervensi ini juga mengakibatkan terus terdesaknya pasukan rezim Pol Pot yang didukung RRC.

Semakin terdesaknya pasukan Pol-Pot menimbulkan kemarahan RRC yang dibuktikan pada pertengahan tahun 1978 pemerintahan Beijing memutuskan untuk menghentikan semua bantuannya kepada Vietnam. Penghentian bantuan ini memperparah keadaan ekonomi di dalam negeri Vietnam, karena dengan adanya penghentian bantuan pemerintah RRC kepada pemerintah Vietnam membuat negara Vietnam sangat kekurangan bahan-bahan baku untuk pembangunan sehingga proyek-proyek yang mendapat bantuan RRC semuanya berhenti. Hal itu lebih lanjut mengakibatkan banyak tenaga ahli dan teknisi RRC ingin pulang ke RRC dan membuat kepanikan sekitar 300.000 orang keturunan Cina yang tinggal di sebelah Vietnam bagian Utara. Kepanikan semakin meningkat dengan terjadinya kontak-kontak senjata di perbatasan kedua negara yang membuat kondisi hubungan kedua negara terus memburuk mengakibatkan sekitar 250.000 orang keturunan Cina mengungsi ke RRC.

Intervensi Vietnam ke Kamboja memberikan gambaran bagaimana mudahnya negara-negara besar di luar kawasan Asia Tenggara ikut serta melibatkan diri untuk kepentingan mereka masing-masing. Terseretnya mereka dalam kancah konflik kawasan Asia Tenggara, maka akan semakin rumit masalah yang timbul dan semakin sulit pula untuk diselesaikan. Implikasi konflik kawasan Indo-China apabila melebar ke negara tetangga, merupakan tantangan serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Konflik Vietnam-Kamboja membuat situasi di kawasan Asia Tenggara semakin rumit, karena disatu pihak anti komunis di pihak lain bekerja sama dengan pihak komunis dalam masing-masing upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Disamping itu adanya arus pengungsi Indo-China yang terus menerus memasuki wilayah negara-negara ASEAN dari tahun ke tahun.

Arus pengungsi tersebut menambah beban yang tidak ringan bagi negara-negara ASEAN, khususnya Thailand, Malaysia dan Indonesia. Dari perkembangan diatas jelaslah bahwa Vietnam pantas disebut sebagai sumber segala permasalahan mengalirnya arus pengungsi Indocina. Jadi tepatlah bila konferensi para Menlu ASEAN ke-12 di Bali pada tahun 1979 menunjuk Vietnam sebagai negara yang bertanggung jawab atas masalah pengungsi.

Vietnam juga mengakui tekanan yang diciptakan itu membuat banyak warga negaranya yang melakukan pengungsian ke wilayah-wilayah negara anggota ASEAN, namun negara Vietnam sendiri tidak menunjukkan sikap serius dalam menangani masalah pengungsi. Bahkan, masalah pengungsi ini diserahkan kepada negara ketiga seperti Amerika Serikat, Canada, Inggris dan Jerman Barat. Atas dasar itu logis apabila negara-negara anggota ASEAN menuduh

Vietnam dengan sengaja menciptakan kondisi ketidakstabilan di kawasan Asia Tenggara.

Selain penduduk mayoritas terdiri dari rakyat Vietnam, masih ada penduduk yang di kategorikan minoritas di negara Vietnam yaitu diantaranya (a) bangsa Champa, yang banyak terdapat di wilayah *Da Nang*, *Phan Rang*, *Phan Thiet*, *Tay Ninh*, dan *Chau Doc*. Mereka tinggal di daerah Hue karena kondisi Negara Vietnam pada abad ke-19 mengalami kekacauan maka kemudian para suku ini terdesak ke Vietnam bagian Selatan. (b) bangsa *Indonesia-Melayu* yang disebut Montagnards (orang gunung). Kelompok ini disebut suku Kha atau Dong Bao Thuong artinya saudara seperjuangan yang berasal dari gunung. (c) bangsa China berjumlah kurang lebih 1.000.000 orang dan sebagian besar kurang lebih 75 % telah menjadi warga negara Vietnam dan sisanya menjadi warga negara asing. Mereka umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, dan memiliki pasar besar yang disebut *Cholon* dipinggiran kota Saigon.

Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa hubungan antar suku di negara Vietnam dapat dikatakan baik-baik saja yang ditandai dengan tidak adanya pertikaian atau konflik yang belatar belakang mengenai perbedaan ras. Namun setelah negara Vietnam bersatu pasca perang saudara hubungan antar suku mengalami permasalahan khususnya bagi warga yang berasal dari Vietnam selatan yang berasal dari suku China. Pemerintah Vietnam yang telah bersatu melakukan diskriminasi terhadap rakyat keturunan China khususnya dalam bidang pekerjaan dan pendidikan.

Perlakuan diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Vietnam menimbulkan orang Vietnam Selatan melakukan eksodus ke negara-negara Asia Tenggara diantaranya Filipina, Malaysia, Hong Kong dan Indonesia. Para pengungsi menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengungsi ke negara-negara yang dianggapnya aman, karena itu mereka disebut *boat people* (manusia perahu). Kondisi negara Vietnam yang tidak stabil pasca perang saudara yang berkepanjangan menjadi alasan bagi para pengungsi untuk meninggalkan negara mereka khususnya bagi warga Vietnam Selatan. Tujuan para pengungsi Vietnam tidaklah jelas negara mana yang akan mereka ingin datangi namun, menurut mereka lebih baik mencari negara singgahan lain daripada menetap di negara mereka sendiri yang tidak bisa memberikan mereka jaminan hidup aman dan sejahtera.

Di negara Indonesia Kepala Staf Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo melaporkan bahwa pada tanggal 19 Mei 1975 pengungsi-pengungsi dari Vietnam telah mulai berdatangan di Indonesia menurut laporan tersebut sejumlah 92 orang hanya singgah di Tarempa, kecamatan Siantar, Kepulauan Riau dalam perjalannya ke Singapura. Sedangkan manusia perahu yang pertama kali dan ingin menetap di Indonesia yaitu manusia perahu yang mendarat di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, kepulauan Natuna pada tanggal 25 Mei 1975 dalam keadaan yang sangat mengenaskan.

Jumlah pengungsi yang semakin meningkat tiap harinya menurut pemerintah setempat menampung

mereka dibaloi kecamatan. Keberhasilan perahu pionir ini disusul dengan jumlah yang amat besar, melebihi jumlah penduduk setempat. Pulau Anambas yang hanya berpenghuni 3.000 orang, kedatangan manusia perahu yang jumlahnya 4.000 orang. Gelombang demi gelombang para pengungsi memasuki wilayah kepulauan Riau sehingga merepotkan pemerintah setempat. Pemerintah daerah Riau harus menyediakan makanan dan air. Mereka mendarat di pulau-pulau kecil yang jaraknya berjauhan. Panglima Kowilhan selaku laksus panglima Kopkamtibwil I, Letnan Jenderal Poniman, pada tanggal 28 April 1975 memerintahkan agar pengungsi Vietnam ditampung. Gubernur juga memerintahkan Bupati Riau Kepulauan untuk menampung pengungsi di Pulau Bintan. Arus pengungsi ini mengalir deras melalui petunjuk ajungan Conoco di perairan Natuna.

Jumlah yang terbesar diangkut oleh kapal Southen cross, lebih kurang 1.200 orang dan mendarat di Pulau Pengibu, suatu pulau kosong yang tidak mempunyai sumber air. Berpuluh-puluh karung beras dan drum air diserahkan ke tanjung Pinang. Kemudian TNI AL dengan kapal LST memindahkan mereka ke Tanjung Ugang.

Mengatasi problema pengungsi ini, pada bulan februari 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN, mengadakan pertemuan di Bangkok, yang menghasilkan *Bangkok Statement* 21 februari 1979. Negara-negara ASEAN setuju bekerja sama untuk meringankan beban pengungsi dengan menyiapkan tempat pusat *processing*, sebagai tempat transit sementara dengan batas waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. UNCHR dan negara-negara maju pun diharapkan memberikan bantuan. Penanganan pengungsi dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Soeharto dengan perdana menteri Thailand Kriangsak Chomanand, karena jumlah pengungsi telah mencapai 200.000 orang yang tersebar di negara-negara ASEAN. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Menlu RI Mochtar Kusumaadmadja pada bulan April 1979 berangkat ke Jenewa menemui Paul Harthing Commissioner UNCHR. Usul Indonesia menawarkan Pulau Rempang atau Galang sebagai pusat *processing* pengungsi disetujui. UNCHR kemudian membuka kantor di Jakarta, sekaligus menyelenggarakan pertemuan 24 negara pada tanggal 15-16 Mei 1979. Dari hasil pertemuan tersebut pemerintah Indonesia membentuk tim pembangunan tempat pemrosesan yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departement Hankam, dan Departement Dalam Negeri.

Pada 2 Juli 1979, Menteri Hankam membentuk tim Penanggulangan Dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V). Mayjend Moerdani (Asintel Hankam) ditunjuk sebagai ketuanya, Pada tingkat daerah dibentuk P3V daerah yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Unsur pelaksanaannya adalah satuan pengamanan dan perawatan di bawah Letnan Kolonel Polisi Drs. Koenarto. Setelah urusan selesai, tugas tim dikukuhkan dengan Surat keputusan Presiden No.38/1979/11 September 1979. Menteri Luar negeri ditugasi untuk menyelenggarakan aksi diplomasi Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah ditugasi untuk melakukan tindakan pencegahan agar pengungsi tidak memberatkan kehidupan penduduk setempat pusat

pemrosesan di Pulau galang yang dibangun sejak 1 Juni 1979 pada bulan Agustus 1979 telah selesai. Para pengungsi diberbagai tempat mulai dipindahkan ke Pulau Galang. Beberapa negara memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum. Salah satunya negara Jepang yang bersedia memberikan bantuan yang dikatan melalui Menteri Luar negeri Jepang yaitu Sunao Sonoda kepada UNHCR akan memberikan bantuan 57 Juta Dollar AS kepada negara-negara yang mendirikan tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam salah satunya Indonesia.

A. Alasan Pulau Galang Sebagai Tempat Penampungan

Pulau yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi Vitenam yang datang ke Indonesia bernama Pulau Galang, pulau yang terletak di Selatan Pulau Batam adalah salah satu gugusan Kepulauan Riau. Pulau ini dijadikan tempat penampungan para pengungsi Vietnam yang telah masuk kewilayah Indonesia sejak tahun 1975 sampai dengan 1979. Mereka dikumpulkan di Pulau Galang sambil menunggu negara ketiga yang bersedia menampungnya sebagai warga tetapnya.

Pulau Galang yang luasnya seperempat Republik Singapura itu, dibangun barak-barak tiap barak berisi 100 orang pengungsi dengan nantinya dibangun tempat penerangan listrik serta fasilitas umum. Pada tahun 1975 tempat penampungan sudah ditempati oleh 966 pengungsi. Pada tahun 1979 untuk sebagai tempat pemrosesan sekaligus pemusatan pengungsi Vietnam di Indonesia dilakukan beberapa tahap yang saling berkelanjutan. Tahap pertama, tempat penampungan ini akan menerima 10.000 pengungsi yang dibawa berasal dari Pulau Bintan. Tahap selanjutnya, 10.000 lagi. Di pulau ini ditempatkan perwakilan-perwakilan negara penerima untuk mengurus proses pemberangkatan pengungsi dengan pihak UNHCR (United Nation High Comissioner of Refugees).

Berbagai pertimbangan pemerintah Indonesia mengenai Pulau Galang yang dijadikan tempat penampungan dan pemrosesan bagi para pengungsi Vietnam diantaranya :

B.1. Segi geografis.

Kepulauan Riau merupakan daerah yang terdiri dari berbagai pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Dari berbagai banyaknya pulau yang ada di Riau pemerintah Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Pulau Galang. Pulau yang terletak sekitar 50 km diselatan tanjung pinang dan memiliki luas lebih dari 175 km². Pulau Galang terdapat pantai yang sebagian besar berpasir dan sebagian lagi berwujud hutan bakau sedangkan kedalamannya antara 10-12 meter dalam keadaan pasang. Pulau Galang terdiri dari bukit-bukit dengan hutan yang tidak terlalu lebat sedangkan dataran yang ada berupa semak belukar.

Letak geografis yang berdekatakan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan kepulauan Riau sbagai tempat transit bagi warga asing yang hendak melakukan perjalanan maupun sepulang dari singapura maupun Malaysia. Atas dasar

itulah Pulau Galang yang terletak berdekatan dengan jalur pelayaran internasional dipilih pemerintah Indonesia sebagai tempat penampungan sekaligus pemrosesan para pengungsi Vietnam yang berdatangan di wilayah Indonesia. Pulau Galang yang terletak dengan jalur pelayaran internasional memudahkan pemerintah Indonesia dalam melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani pengungsi Vietnam.

Bentuk koordinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga misal dengan negara Malaysia yaitu berupa saling memberikan informasi apabila dilakukan pengusiran dari perairan Malaysia maka patroli Indonesia diberitahukan sehingga bisa dilakukan pencegahan. Bentuk koordinasi ini akan lebih efisien dibandingkan patroli bersama-sama antara kapal-kaal Indonesia dan Malaysia maka cukup hanya saling bertukar informasi antara Indonesia dengan Malaysia.

B.2. Segi politik.

Semakin aktif Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga maupun dalam forum Internasional untuk menangani arus pengungsi Vietnam yang hadir di wilayah Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi negara Indonesia yaitu citra negara Indonesia yang menganut politik bebas aktif semakin diakui oleh negara-negara lain.

Penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang memudahkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Semakin seringnya Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk mengatasi kedatangan pengungsi Vietnam membuat hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga semakin kuat. Bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara tetangga untuk mencegah kedatangan pengungsi Vietnam yaitu saling bertukar informasi mengenai kedatangan pengungsi Vietnam dengan Pemerintah Malaysia. Selain,dirasa lebih efisien karena tidak perlu dilakukan patroli bersama-sama antara kapal Indonesia maupun Malaysia dilain sisi adanya kerjasama ini membuat semakin erat hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia.

Sama dengan negara Malaysia, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan negara Singapura. Bentuk kerja sama dengan negara Singapura yaitu berupa diadakan patroli bersama di areal teritorial masing-masing. Tujuan diadakan kerjasama ini untuk mencegah pengungsi yang datang dan adanya penyelundupan.

B.3. Segi historis.

Penunjukan Pulau Galang sebagai tempat penampungan ternyata bukan pada tahun 1979 saja. Pada tahun 1946 pemerintah R.I menyetujui Pulau Galang menjadi transito bagi pemulangan bala tentara Jepang yang akan dipulangkan oleh pihak sekutu. Untuk mengawasi supaya tidak terjadi penyelewengan pengiriman tentara ke tempat lain maka disertakan pula wartawan, sebab waktu itu Pemerintah RI masih sangat curiga kalau tawanan-tawanan Perang itu diselewangkan ke tempat lain.

Sebelum diberangkatkan ke Pulau Galang para tawanan Jepang ditempatkan di beberapa tempat salah satunya di Malang. Salah satu pelabuhan untuk memberangkatkan tawanan Jepang di Jawa adalah Probolinggo. Pemberangkatan para tawanan dilakukan secara rahasia, setelah lepas jangkar dari pelabuhan Probolinggo kapal yang bernama Hana Maru segera berlayar dengan kecepatan 8 knot menuju timur dengan tujuan menghindari pelabuhan Surabaya yang pada saat itu telah dikuasai oleh tentara NICA. Setelah kapal memasuki Laut Jawa barulah ia membelok ke arah barat laut.

Pada awal kedatangan para tawanan ini mereka tidak mempunyai bahan makanan untuk dimakan dan tidak ada pula bahan makanan untuk diolah, sehingga terjadi kekurangan gizi bagi para tawanan Jepang. Hari pertama mereka makan pucuk-pucuk daun karet namun setelah datang bantuan dari pihak sekutu beserta peralatan untuk bertanam, bibit singkong, bibit sayur mayur dan lain-lain. Pada saat itu mulai lah bercocok tanam.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengungsi Vietnam

Jumlah pengungsi Vietnam di negara-negara ASEAN mencapai 183.261 orang dengan perincian sebagai berikut :135.000 orang di Thailand (tidak termasuk sekitar 400.00 pada saat perang Indocina pertama tahun 195-an);42.551 orang di Malaysia; 3.200 orang di Indonesia; 2.250 di Philipina dan 300 orang di Singapura.Melihat perkembangan data di atas,ternyata Thailand, Malaysia dan Indonesia telah kedatangan pengungsi yang besar dan telah menimbulkan masalah-masalah sosial dan keamanan di negara-negara itu.

Beberapa usaha penyelesaian telah dilakukan baik secara regional maupun internasional untuk mengatasi pengungsi yang ada, negara-negara ASEAN pada akhir bulan february 1979 telah sepakat untuk mendirikan pusat pemrosesan yang dimaksudkan untuk menampung mereka yang sudah pasti diterima di negara-negara ketiga. Untuk mencegah membanjirnya pengungsi tersebut, misalnya di negara Thailand,Malaysia dan Indonesia telah sepakat untuk mengadakan patroli bersama dan hampir bersamaan waktunya. Ketiga negara ini mengumumkan akan mengerahkan patroli darat,laut dan udara. Di Indonesia cara untuk mencegah bertambahnya pengungsi Vietnam yang berdatangan salah satu cara yang ditempuh ialah melalui Operasi Halilintar Untuk mengatasi masalah penyelundupan dan pengungsi Vietnam terutama di perairan Riau. Pemerintah Indonesia telah membentuk Komando operasi Halilintar. Berdasarkan keterangan dari Pang kopkamtib operasi Halilintar diperkuat oleh unsur-unsur dari laut dan beberapa unit kapal antara lain dari Perhubungan Laut,Bea Cukai,Polisi Air,TNI-AL,dan juga diperkuat oleh Eksader Nusantara dengan satu kapal markas,2 freget,satu kapal selam,satu kapal tanker,tiga pesawat Nomad dan TNI AU.

Operasi Halilintar tersebut dipegang oleh seseorang berbintang dua (Mayjen) dan Wakil I dari Pangdaeral II serta wakil II dari kepala Staf Kaskar Laksusda Sumatra Barat. Mereka semua akan

ditempatkan di Tanjung Pinang. Diperhitungkan 20 kapal setiap harinya akan beroperasi diperairan tersebut. Untuk daerah Pekanbaru Laksuwil I menempatkan Wakil panglimanya dalam pengertian sebagai pos depan, tujuannya untuk mengkoordinir forum koordinasi antara Laksus, Pemerintah daerah, Kanwil, POLRI maupun TNI-AL.

Sedangkan Pelaksanaan penanggulangan pengungsi Vietnam di Indonesia ditangani oleh Tim penanggulangan dan penanganan pengungsi Vietnam (P3V) di bawah Departemen Hankam RI berdasarkan kepres RI no.38 tahun 1979. Pada 2 Juli 1979, Menteri Hankam membentuk tim Penanggulangan Dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P3V). Mayjend Moerdani (Asintel Hankam) ditunjuk sebagai ketuanya, Pada tingkat daerah dibentuk P3V daerah yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Unsur pelaksanaannya adalah satuan pengamanan dan perawatan di bawah Letnan Kolonel Polisi Drs. Koenarto. Setelah urusan selesai , tugas tim dikukuhkan dengan Surat keputusan Presiden No.38/1979/11 September 1979. Menteri Luar negeri ditugasi untuk menyelenggarakan aksi diplomasi Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah ditugasi untuk melakukan tindakan pencegahan agar pengungsi tidak memberatkan kehidupan penduduk setempat pusat pemrosesan di Pulau Galang yang dibangun sejak 1 Juni 1979 pada bulan Agustus 1979 telah selesai. Para pengungsi diberbagai tempat mulai dipindahkan ke Pulau Galang. Beberapa negara memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum. Salah satunya negara Jepang yang bersedia memberikan bantuan yang dikatakan Menteri Luar negeri Jepang yaitu Sunao Sonoda kepada UNHCR akan memberikan bantuan 57 Juta Dollar AS kepada negara-negara yang mendirikan tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam salah satunya Indonesia.

Organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan pengungsi Vietnam yaitu diantaranya PMI. PMI ikut serta dalam program penanggulangan ini dibawah koordinasi Tim P3V dan ditangani oleh suatu proyek khusus sebagai salah satu Unit kerja di markas besar PMI. Selain PMI juga terdapat beberapa orgaisasi penanggulangan pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Sebagai penyandang dana proyek ini adalah UNHCR disamping organisasi internasional lainnya seperti federasi Internasional, Catholic Church atau Concorsium.

P3V yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Kepres no.38 tahun 1979 mempunyai tugas untuk memproses penangulangan dan pengelolaan Pengungsi Vietnam yang berada di Indonesia diantaranya :

Arus pengungsi Vietnam yang menggunakan kapal-kapal laut mengalir ke arah kepulauan Riau, disebabkan letak geografisnya dan arah hembusan angin musiman.

C. Dampak Kedatangan Pengungsi Vietnam bagi Penduduk Lokal Di Pulau Galang

Kedatangan pengungsi Vietnam di Pulau Galang sudah pasti menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat asli di Pulau Galang. Di negara asal Vietnam telah terjadi pengungsian 4 periode yaitu pada periode

pertama terjadi mulai tahun 1964 sesudah disetujui perjanjian Genewa yang membagi Vietnam menjadi dua yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dalam persetujuan tersebut ada ketentuan yang mengizinkan orang mengungsi dari Selatan ke Utara Vietnam, kebanyakan orang yang beragama Katolik melakukan pengungsian dari Uatara ke Selatan yang diperkirakan hampir 1 juta jiwa. Arus kedua terjadi pada bulan Maret sampai dengan April 1975 ketika terjadi serangan besar-besaran Vietnam Selatan oleh Vietnam Utara pada saat itu arus pengungsi terdiri dari orang Vietnam, orang Cina dan Orang Asing. Arus ketiga terjadi saat jatuhnya kota Saigon ketangan Vietnam utara pada tanggal 30 April 1975 pada saat itu sebgaiian besar pengungsi adalah orang Vietnam dan pada bulan maret sampai dengan Mei 1978 orang Cina secara terang-terangan juga ikut arus pengungsi. Kedatangan arus pengungsi yang mempunyai perbedaan latar belakang budaya menimbulkan pembaruan nilai dalam masyarakat di Pulau Galang.

Perubahan sosial disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan dan pembaharuan struktur sosial, sedangkan dipihak lain mengandung makna perubahan dan pembaharuan nilai. Perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat adanya proses pembangunan tempat-tempat fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Pembangunan tersebut berakibat terjadi proses perubahan masyarakat dalam segala segi kehidupan diantaranya :

Persepsi terhadap kehadiran proyek pembangunan umumnya positif, walaupun ada diantaranya yang memiliki persepsi negatif. Hal ini tidak berarti, pembangunan proyek pembangunan berbagai fasilitas umum untuk para pengungsi Vietnam adalah bentuk ideal bagi masyarakat lokal. Persepsi negatif terhadap pembangunan pembangunan fasilitas umum, selain dipengaruhi oleh kesan terhadap program pemerintah dan juga nasib para penduduk lokal yang tidak mendapat perlakuan yang sama seperti para pengungsi Vietnam hal ini disebabkan UNHCR selaku penyandang dana bantuan pengungsi Vietnam di Indonesia tidak mempunyai ruang lingkup wewenang untuk memperbaiki kehidupan rakyat setempat.

Lapangan pekerjaan yang tersedia setelah kehadiran proyek Pembangunan fasilitas untuk bagi para pengungsi, dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama yang sementara dan; kedua yang tetap. Pekerjaan yang sementara yaitu membangun sarana perumahan di lingkungan proyek pembangunan fasilitas umum. Pekerjaan ini berlangsung tidak begitu lama sebab dalam beberapa bulan kemudian bangunan yang digunakan untuk perumahan karyawan proyek pembangunan fasilitas umum jadi dan bisa ditempati, para tukang itu keluar. Jenis pekerjaan yang tetap antara lain, adalah tenaga buruh perkebunan, karyawan pabrik, staf karyawan proyek. Tenaga kerja sebagian besar adalah masyarakat setempat, bahkan diantara mereka ada yang menjadi pedegang besar.

Kehadiran proyek pembangunan fasilitas umum bagi pengungsi Vietnam di Pulau Galang menimbulkan perubahan tatanan masyarakat di Pulau Galang terutama

dalam hal sistem gotong royong perkembangan dan perbedaan fungsi dalam masyarakat pada saat itu cenderung mengubah bentuk gotong royong. Kenyataan ini sesuai dengan teori solidaritas organik dan mekanik Durkheim menyatakan bahwa pada bentuk solidaritas organik, terintegrasi karena adanya keseragaman pola-pola relasi sosial, yang dilatar belakangi oleh kesamaan pekerjaan dan kedudukan semua anggotanya, sedangkan solidaritas mekanik, masyarakat mulai berubah, setelah penambahan penduduk memaksa masyarakat untuk merundingkan suatu pembagian kerja. Pembagian ini mengakibatkan perbedaan kepentingan, status dan pikiran yang menjurus kepada pola interaksi yang parsial dan fungsional, untuk mencapai kesatuan dibutuhkan undang-undang, peraturan-peraturan, kontrak atau perjanjian, dan suatu ideologi atau seperangkat nilai-nilai yang bersifat lebih umum dan abstrak.

Perubahan sistem hubungan kerja tersebut, sejalan dengan semakin intensifnya peredaran uang di lingkungan mereka, karena proyek pembangunan fasilitas untuk pengungsi menganut manajemen modern yang dalam imbalan tenaga selalu dibayar dalam bentuk uang kontan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayogyo (1985), bahwa kehadiran proyek ekonomi dari luar yang dikerjakan secara modern telah menghancurkan pranata desa tradisional berazaskan tolong menolong yang diganti dengan sistem upah yang dibayar dengan uang kontan. Terbukti dalam penelitian atas rencana pembiayaan untuk pengungsi Vietnam di Indonesia yang diajukan oleh departemen sosial yang di dalamnya terdapat jenis kegiatan, pembagian tugas serta upah masing-masing petugas yang terkait dalam penanganan pengungsi Vietnam di Indonesia.

Sistem upah modern pada umumnya berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya karena dasar kerja yang digunakan adalah pembagian kerja yang jelas dan menuntut dilakukan secara profesionalisme. Sistem upah yang rasional yang dipraktekkan secara modern oleh pihak pembangunan fasilitas untuk pengungsi Vietnam, sudah berpengaruh terhadap sistem upah tradisional. Akibat masuknya proyek pembangunan fasilitas umum, prinsip kebersamaan secara tradisional yang sejak dulu menjadi sistem nilai hidup bermasyarakat untuk menjamin kelangsungan kehidupan bergeser menjadi sistem nilai yang berbentuk konkrit dalam bentuk imbal jasa berupa upah, terutama aktivitas dalam mengangani pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

Peralihan dari sistem upah tradisional ke arah sistem upah modern telah memunculkan struktur sosial baru di dalam masyarakat pedalaman yakni adanya golongan pencari upah atau pekerja yang hidup berdampingan dengan para pendatang.

Penduduk lokal Pulau Galang juga harus menghadapi Jiwa saudagar atau pedagang dari pengungsi Vietnam yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka walau dalam keadaan sulit sekalipun. Seperti yang dijumpai di beberapa kamp pengungsi. Banyak dari mereka yang membuka kedai kopi atau makanan serta minuman, jual rokok serta bermacam-macam barang kebutuhan pokok lainnya seperti ikan asin. Ada juga yang menjadi penjahit pakaian, penjual kayu bakar, penjual air dan tukang ramal.

Di Tanjung Uban ditemui para pengungsi main kartu domino, perkelahian antar sesama dan berani mencuri buah-buahan milik penduduk. Akibat dari arus pengungsi ini tidak saja beban berat bagi pemerintahan Indonesia, khususnya Pemda Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau dengan antara lain terpaksa menyediakan tempat-tempat penampungan sementara, obat-obatan, makanan serta kebutuhan lain bagi para pengungsi, tetapi juga berakibat yang lebih luas lagi yakni langsung membebani masyarakat daerah setempat. Anggaran dana yang disediakan UNHCR untuk para pengungsi disediakan sebesar Rp.400 per orang dengan dana yang terbatas yang tidak mencukupi jumlah pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang makin hari makin meningkat menimbulkan keresahan bagi pemerintah setempat disisi lain beban berat yang terpaksa harus dipikul oleh masyarakat daerah kepulauan Riau khususnya masyarakat Pulau Galang antara lain terjadinya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, kerusakan ladang dan kebun, pencemaran lingkungan, terjangkitnya wabah-wabah penyakit serta akibat-akibat sosial yang negatif lainnya seperti pencurian, perkelahian dan pelacuran.

Masyarakat juga dibebani oleh persaingan dalam hal perdagangan yang dilakukan pengungsi keturunan China yang notabnya berasal dari golongan kaya dan mempunyai modal dalam mendirikan usaha di sekitar tempat pengungsi. Warga sekitar kamp penampungan pengungsi Vietnam mencemaskan perdagangan yang dilakukan oleh orang Tionghoa dalam kamp pengungsi ialah terjadi *black market* dalam bidang penjualan beras, tepung dan kebutuhan sehari-harinya. Hal ini disebabkan keturunan Tionghoa cepat-cepat membangun suatu perdagangan dan banyak diantaranya menerima uang dari sanak keluarga yang sudah dimukimkan di Barat atau membawa permata dan emas dari Vietnam.

Kehadiran proyek pembangunan fasilitas umum telah menyebabkan kerja sama tidak hanya terbatas dalam lingkungan komunitas mereka sendiri, tetapi sudah melibatkan orang luar terutama dengan pihak pemerintah. Persaingan yang sangat terlihat jelas adalah persaingan dalam memperoleh kesempatan untuk dapat bekerja pada proyek pembangunan fasilitas umum. Demikian juga dalam memugar dan memperbaiki rumah yang diganti dengan bangunan yang lebih kuat, besar dan permanen serta adanya persaingan dalam membeli barang-barang konsumtif seperti perhisian yang banyak dibawa oleh para pengungsi Vietnam.

Kehadiran proyek pembangunan fasilitas umum, telah menyebabkan munculnya kompleksitas persaingan tidak hanya persaingan ekonomi tetapi juga persaingan sosial dan politik. Suparlan mengemukakan bahwa persaingan di dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu ada dan tidak dapat diingkari lagi kehadirannya berarti setelah kehadiran proyek pembangunan fasilitas umum persaingan yang terjadi tidak hanya terbatas pada perebutan sumber daya alam, tetapi juga persaingan dalam pendidikan dan politik.

Konflik yang terjadi setelah masuknya proyek pembangunan fasilitas umum, tidak hanya tentang tanah semata-mata, tetapi juga sudah menyangkut pergaulan

anak-anak muda, antara tetangga dan warga yang kurang sehat. Menurut Rauf karena masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, selalu saja terjadi konflik antara warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial. Dalam kaitan itu, konflik atau pertikaian yang terjadi di lokasi penelitian secara perorangan antara tetangga pada umumnya disebabkan oleh masalah-masalah yang berkisar pada kehidupan ketetanggaaan. Seperti adanya kecemburuan sosial terhadap tetangga yang hidupnya lebih maju, adanya tetangga yang tidak menepati janji. Konflik terbuka antara sesama warga dalam skala besar setelah masuknya pembangunan fasilitas umum memang belum pernah terjadi, tetapi konflik individual dalam skala kecil memang sering terjadi. Seperti ada seorang pengungsi Vietnam keturunan Cina membuka kedai Kopi di kamp Tanjung Unggat kepulauan Galang. Kedatangan para pengungsi menimbulkan adanya persaingan dalam hal mata pencaharian khususnya dalam hal perdagangan.

KESIMPULAN

Semakin meningkatnya arus pengungsi yang berdatangan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran pemerintah Indonesia. Semakin banyaknya pengungsi Vietnam yang tidak terorganisir datang ke Indonesia menyebabkan terganggunya stabilitas kondisi dalam negeri oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut pemerintah Indonesia menyediakan satu tempat khusus untuk menampung para pengungsi yaitu di Pulau Galang kepulauan Riau.

Pemilihan pulau Galang sebagai tempat pemusatan para pengungsi Vietnam dilandaskan lokasi geografis Pulau Galang yang dekat dengan jalur pelayaran Internasional sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga untuk menangani pengungsi Vietnam di Indonesia. Pulau Galang yang luasnya seperempat Republik Singapura, dibangun barak-barak. Tiap barak berisi 100 orang pengungsi dengan nantinya dibangun tempat penerangan listrik serta fasilitas umum. Pada tahun 1975 tempat penampungan sudah ditempati oleh 966 pengungsi. Sedangkan pada tahun 1979 untuk sebagai tempat pemrosesan sekaligus pemusatan pengungsi Vietnam di Indonesia.

Kedatangan arus pengungsi yang mempunyai perbedaan latar belakang budaya menimbulkan pembaruan nilai dan sosial dalam masyarakat di Pulau Galang. Perubahan dalam segala segi kehidupan yang terjadi sebagai akibat adanya proses pembangunan tempat-tempat fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Pembangunan sarana dan prasana menyebabkan tatanan masyarakat di Pulau Galang juga mengalami perubahan baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Penampungan pengungsi Vietnam memaparkan pada generasi penerus bangsa bahwa negara Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila bukan hanya sekedar wejangan saja namun benar-benar ditegakkan serta diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Penampungan pengungsi Vietnam di Pulau Galang dapat dijadikan cermin bagi kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan yang akan datang, dapat dijadikan

modal untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini mulai luntur ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia Sejarah mampu menyajikan fakta yang dapat mendorong anak didik untuk lebih mencintai tanah air, bertindak dan bermoral Pancasila, serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1979 Tentang Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.

Surat Nomor B-0686/Setkab/Hkm/6/79 mengenai Naskah Kep. Pres. Tentang Pembentukan Team Penanggulangan, Pengelolaan, dan Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia.

Struktur Koodinasi Team Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam.

Visualisasi Proses Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam.

B. Sumber Buku dan Hasil Penelitian

A.M.Sadirman.1983. *Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara*. Yogyakarta:Liberty.

Asmani Usman dan Rizal Sukma.1992. *Konflik Laut Cina Selatan Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta : CSIS.

Athur S.Banks dan W.Overstreet.1981.*Political Handbook of The World*. New York : McGrawHill book Company.

Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*

Dudung Abdurrahman.1999.*Metodologi Penelitian Sejarah*.Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Dwipayana G. dan Ramadhan K.H.1989. *Soerhato,Pikiran,Ucapan Dan Tindakan Saya (Autobiografi)*,Jakarta .

Hadi Soesastro.1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik*. Jakarta : Yayasan Proklamasi.

Ensiklopedi Indonesia.1992. *Seri Geografi Asia jilid 3*. Jakarta : ichtiar Baru Van Hoeve.

Marwati Djoened,dkk.2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV (Edisi revisi)*. Jakarta : Balai Pustaka.

M.C.Ricklefs.2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.

Ramadhan.2005.*Sejarah Pengungsi Indonesia*. Jakarta:Direktorat Jenderal Imigrasi.

Roeslan Abdoelgani.1978.*Indocina Dalam Kawasan Asia Tenggara Dewasa Ini*. Jakarta : Yayasan Indrayu.

Saleh A.Djamhari.Memoar Jenderal TNI (Purn.) Soemitro.1994. *Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional*.

S.T.Munadjat.Danusaputro.1983. *Vietnam Dalam Perkembangan Asia Raya Jaya*. Jaya Binacipta : Jakarta

Suradji Norwijanto.2002.*Vietnam Bersatu dan pengaruhnya Terhadap stabilitas Politik Asia Tenggara*. Suarabaya : Unesa University Prees.

Tim peneliti.1982. *Vietnam,Kamboja, dan Laos*.FISIPOL UNAIR.

T.B.Simatupang.1980. *Ketahanan Nasioanal Dalam Situasi Baru Di Asia Tenggara*. Jakarta : idayu.

Year book of Encyclopedia Americana.New York : Grolier.

C. Sumber Koran dan Majalah

Antara edisi Oktober 1973 dan September 1979

Kompas edisi April, Juni, Juli, dan September 1979

Memorandum edisi Maret 1979

Merdeka edisi Juli 1979

Selecta edisi Juni dan Agustus 1979

Suara Karya edisi Desember 1978

Surabaya Post edisi Maret, April dan Mei 1975

